

ANALISIS PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sonny

sonny@sulteng.go.id

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This research aimed at finding out and analyzing the e-Government of Central Sulawesi Province and to what extent the e-government has been implemented. This research used descriptive method employing qualitative approach. The informants were taken purposively, which means that they understood well about the subject matter and those who got involved in the e-government. The technique used was qualitative data analysis in which the researcher's own reasoning for connecting facts, data, and information was used. In this research, implementation of E-Government in Central Sulawesi Province Government has not run optimally and effectively, because it is not supported by the quality and capacity of Human Resources (Human Resource Skills) consequently less data is valid and up to date. In addition, the Internet network running optimally in accessing data from outside because it is not supported by device policy for the Governor of Central Sulawesi. Financing e-government in the province of Central Sulawesi done in stages in accordance with what has been planned to the area 2011-2016.

Keywords: *E-Government, Local Government and Good Governance*

Pelayanan publik dalam era otonomi daerah menjadi isu penting bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kearah yang lebih prima. Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi pangkal pelaksanaan otonomi daerah, yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan hingga kini telah mengalami beberapa kali perubahan, berdampak pada timbulnya semangat bagi seluruh daerah untuk bersaing dalam memajukan daerahnya dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di daerahnya.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya adalah mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau *e-government*. Peningkatan daya saing bangsa pada tingkat regional maupun global mendorong upaya transformasi teknologi,

peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, modernisasi manajemen pemerintahan, serta pembaharuan kelembagaan, *reinventing government*, *banishing bureaucracy*, deregulasi dan debirokratisasi, pemanfaatan dan pengembangan *e-government*, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan mengacu kepada peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh kemampuan dan keterampilan profesional dalam berbagai interaksi (Batinggi, 2004).

BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam lingkup perencanaan dan pengendalian pembangunan. Selain itu BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah juga menangani *website* dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam penerapan *e-government* di BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi penghambat saat ini adalah data-data yang akan disajikan pada *website* terutama data-data yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi ini menimbulkan *website* yang dikelola oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah menampilkan data-data yang kurang *up to date*. Koordinasi dengan SKPD juga telah dilakukan namun kurang mendapat respon dengan baik karena *website* yang ada pada SKPD juga belum dikelola dengan baik.

Selain kondisi tersebut, sumber daya manusia yang mengelola *database website* juga menjadi persoalan dalam penerapan *e-government* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kurangnya tenaga-tenaga yang memiliki ketrampilan dan keahlian dalam mengelola seringkali menjadi pengambat dalam penerapannya. Disamping itu, berdasarkan hasil penelitian yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan upaya memaksimalkan penerapan *e-government* pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah belum terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penjabaran Inpres Nomor 3 Tahun 2003. Hal ini menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dalam penerapan *e-government*. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah belum terbit yang mempengaruhi kinerja dan kemampuan Sumber Daya yang pada akhirnya melahirkan data yang akurat dan *up-to date*. Dengan demikian, kenyataan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "***Analisis Penerapan E-Government pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah***".

METODE

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data

tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif. (Moleong, 2004: 131)

Lokasi pada penelitian pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah saat Pemerintah Provinsi sedang mengembangkan *e-government* dimana pada tahap awal berupa peningkatan infrastruktur dan jaringan *e-government*.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, dalam artian bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan memahami masalah yang mewakili karakteristik yang diteliti terutama orang-orang yang terlibat langsung dalam penerapan *e-government*.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara dan pengamatan berkaitan dengan informasi yang menjadi fokus yang akan dikaji, ata sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu analisa data terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi. Terdapat beberapa aktivitas dalam analisis data, yaitu: *Data Reduction*/reduksi data,

Data Display/penyajian data, Conclusion/Verification.

Penyelenggara pemerintahan bukan hanya menjadi pengatur akses jaringan E-Government, tetapi dapat menjadi manajer dan pimpinan. Oleh karena itu, yang menjadi penting dalam teori Sharon S. Dawes (2008) ini adalah adanya kebutuhan kebijakan dan strategi untuk membangun sebuah proses asosiasi sistem dan sumber data-data sehingga dapat dengan mudah untuk dipergunakan, dikelola dan dikonseptualisasikan.

Teori ini cocok dan relevan untuk menjelaskan penerapan *E-Government* pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung beberapa tahun terakhir ini untuk mendukung reformasi birokrasi. Penekanan dari teori ini ini sesungguhnya bahwa penerapan *E-Government* di kantor pemerintah harus didukung dua faktor utama, yaitu kebijakan (*policy*) dalam bentuk regulasi dan strategi (*strategy*) yang jitu. Sementara itu, di penerapan *E-Government* pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum memiliki Peraturan Gubernur (*policy*) sehingga dalam memforlasikan strategi dan program-program terkait dengan pemanfaatan IT tidak berlangsung secara maksimal dan efektif. Meskipun didukung, *skills* yang bagus, *costs*, dan fasilitas teknologi yang memadai, tetapi menjadi kendala dalam melakukan adopsi dan penyebaran informasi secara luas.

Teori ini secara detail menjelaskan enam komponen penting dalam penerapan *E-Government* yang saling satu dengan lainnya terintegrasi dan mempengaruhi, sebagai berikut: Strategi (*Strategy*), Kebijakan (*Policies*), Data (*Data*), Faktor Biaya (*Cost Factors*), Ketrampilan (*Skills*), dan Tehnologi (*Technology*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan E-Government pada Provinsi Sulawesi Tengah

Penerapan *e-government* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bentuk implementasi dari Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Portal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu bentuk aplikasi *e-government* yang dirancang secara sistematis melalui tahapan yang realistis. Portal ini dikelola oleh SKPD yang secara khusus ditunjuk untuk itu. Pembuatan portal Provinsi Sulawesi Tengah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan *e-government* pada pemerintah daerah yang bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan yang mereka butuhkan, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan menggunakan media internet.

Pelaksanaan kebijakan pengembangan *e-government* dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, maka penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standarisasi, dan panduan yang diperlukan harus konsisten dan saling mendukung. Perumusan yang akan dibuat perlu mengacu pada kerangka yang utuh, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembentukan pelayanan publik, dan penguatan jaringan pengelolaan dan pengolahan informasi yang handal dan tepercaya. Seperti yang digambarkan dibawah

ini, kerangka tersebut mengkaitkan semua kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standarisasi dan panduan, sehingga terbentuk landasan untuk mendorong pembentukan pemerintahan yang baik.

Pembangunan infrastruktur dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan fase awal penerapan *e-government*. ini dilakukan dengan melihat kenyataan bahwa belum adanya otomatisasi proses kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan beberapa instansi terkait. Berikut ini adalah arsitektur *e-government* yang akan dibangun untuk fase pertama.

Pengembangan *e-government* yang optimal perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Dengan adanya perencanaan yang baik, penerapan teknologi informasi diharapkan akan dapat didorong untuk memaksimalkan capaian tugas-tugas pemerintahan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan nantinya tidak semata-mata hanya sebagai pengeluaran saja, tetapi dapat menjadi salah satu bentuk investasi yang menguntungkan.

Strategi Penerapan E-Government pada Provinsi Sulawesi Tengah

Strategi merupakan upaya perhatian yang meliputi misi kritis dari sebuah tujuan dimana menitikberatkan pada pelanggan dan *stakeholder*. Efektifitas strategi muncul dari nilai rencana yang jelas tentang pendanaan dan manfaat dari sebuah prakarsa teknologi informasi. Rencana tersebut terletak dalam sebuah pemahaman tentang misi yang berorientasikan pada kebutuhan untuk ditunaikan atau dilayani yang meliputi hubungan sosial secara luas, lingkungan politik, keberadaan infrastruktur dan budaya.

Tahap perancangan strategis merupakan tahap awal yang menandai dimulainya suatu proses pembangunan dan pengembangan *e-government*. Pada tahap ini akan dilakukan suatu perancangan menyeluruh dan terpadu terhadap semua aspek-aspek strategis yang

sangat berkaitan terhadap pengembangan *e-government* di Provinsi Sulawesi Tengah. Tahap ini ditandai dengan dilakukannya beberapa review dan interview terhadap beberapa perangkat pemerintahan daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri. Setelah itu akan dilakukan beberapa proses analisa, seperti analisa kebutuhan, analisa biaya, mendapatkan informasi tentang visi dan misi para pejabat strategis di pemerintahan, dan proses ini akan diakhiri dengan pembuatan perancangan strategis secara tertulis untuk dijadikan dokumentasi dan bahan acuan pengembangan dan penerapan *e-government* di kemudian hari. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat pengembangan *e-government* membutuhkan waktu, biaya dan sumber daya yang cukup besar, sehingga setiap aktifitas harus dapat direncanakan dengan baik dan benar (*visible*) dan terukur (*measurable*).

Penerapan *e-government* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tentunya akan membutuhkan pendanaan APBD sebagai pendukung utama agar *e-government* dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk dapat mencantumkan penerapan *e-government* dalam rencana strategis daerahnya. Hal ini sebagai jaminan agar penerapan *e-government* dapat terlaksana baik dari segi kegiatan maupun pembiayaannya.

Wujud dari keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menerapkan *e-government* tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rencana Strategisnya menjadikan 1 (satu) misi yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur.

Kebijakan E-Government pada Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam kerangka kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi dalam penerapan *e-government* yang menjadi acuan adalah

Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Hal ini dapat dilihat dari adanya situs Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu www.sulteng.go.id dan situs di beberapa SKPD di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Namun demikian belum seluruhnya sistem pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara *online*. Sistem layanan yang diberikan baik pada portal e-government Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun portal yang ada pada instansi baru merupakan informasi-informasi yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Kendala utama yang dihadapi pada penerapan *e-government* di Provinsi Sulawesi Tengah adalah belum adanya dasar hukum penerapannya, baik dalam bentuk Peraturan Daerah minimal Peraturan Kepala Daerah. Sebenarnya landasan hukum ini merupakan unsur yang paling penting yang harus dimiliki dalam penerapan *e-government* karena dengan adanya landasan hukum tersebut Pemerintah Provinsi tidak akan lebih leluasa dalam mengembangkan *e-government*. Kondisi ini menunjukkan kurang seriusan dari pemerintah daerah untuk menerapkan *e-government* secara menyeluruh dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat di daerah.

Dalam kerangka kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi dalam penerapan *e-government* yang menjadi acuan adalah Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Hal ini dapat dilihat dari adanya situs Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu www.sulteng.go.id dan situs di beberapa SKPD di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Namun demikian belum seluruhnya sistem pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara *online*. Sistem layanan yang diberikan baik pada portal e-government Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun portal yang ada pada instansi baru merupakan informasi-

informasi yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Kendala utama yang dihadapi pada penerapan *e-government* di Provinsi Sulawesi Tengah adalah belum adanya dasar hukum penerapannya, baik dalam bentuk Peraturan Daerah minimal Peraturan Kepala Daerah. Sebenarnya landasan hukum ini merupakan unsur yang paling penting yang harus dimiliki dalam penerapan *e-government* karena dengan adanya landasan hukum tersebut Pemerintah Provinsi tidak akan lebih leluasa dalam mengembangkan *e-government*. Kondisi ini menunjukkan kurang seriusan dari pemerintah daerah untuk menerapkan *e-government* secara menyeluruh dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat di daerah.

Untuk mengintegrasikan seluruh implementasi *e-government* dibutuhkan standar dan aturan-aturan pendukung yang dapat dijadikan acuan utama dalam pengembangan *e-government* untuk seluruh instansi. Agar standar dan panduan tersebut dapat diadaptasi oleh seluruh instansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara lebih sistematis dan terpadu, maka perlu diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi yang lebih terperinci dan memudahkan mengikuti tahapan-tahapan kunci yang memungkinkan hasil yang ingin dicapai dapat lebih terukur.

Upaya mengembangkan *e-government* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan agar terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja dari pegawai, terutama yang berkaitan dengan penyediaan data-data sebagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, adanya kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan *e-government* tentunya akan sangat berpengaruh pada cara kerja pegawai.

Pengembangan *e-government* dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangka menciptakan media informasi dan komunikasi birokrasi pemerintah yang transparan dan bersifat

global kepada public. *E-government* juga tidak hanya menjadi tanggungjawab dari pemerintah saja tetapi diharapkan masyarakat juga turut mendukung dalam penerapan *e-government*. Masyarakat umum dapat membantu pemerintah dalam hal mengumpulkan data dan mengorganisirnya.

Ketersediaan Data

Ketersediaan data yang *up to date* dan berkualitas merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *e-government*. Dengan adanya ketersediaan data tersebut, maka dapat dilihat bagaimana data yang disajikan adalah data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan dari penggunaanya.

Pada hakekatnya, antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah terjalin koordinasi yang telah berjalan dengan baik terutama yang berkaitan dengan *sharing* informasi dalam pelaksanaan *e-government*. Hal ini diperlukan agar terdapat *follow up* dari instansi terkait berkenaan dengan data-data yang disajikan. Dengan adanya *follow up* tersebut diharapkan data-data yang tersaji merupakan data-data yang dapat dipercaya dan kredibel.

Data-data dari SKPD maupun instansi terkait yang disajikan dalam penerapan *e-government* merupakan informasi yang menggambarkan keadaan maupun program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Ketersediaan Biaya

Aspek pendanaan merupakan unsur terpenting dalam penerapan *e-government* karena akan menyangkut terlaksananya atau tidak penerapan *e-government*. Membuat jaringan komunikasi secara luas tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Selain untuk membuat jaringan dan sistem informasi, masih dibutuhkan lagi dana untuk pembelian alat dan dana untuk mempersiapkan tenaga pelaksananya. Oleh karena itu, kajian secara mendalam tentang kesiapan dana atau anggaran untuk

menunjang kelangsungan *e-government* perlu dilakukan agar investasi yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia akibat pelaksanaannya tidak diikuti dengan kesiapan di bidang pendukung lainnya. Sumber dana untuk melaksanakan *e-government* juga harus dipertimbangkan secara matang apakah akan menggunakan dana APBD atau didanai dari pinjaman kepada pemerintah pusat. Jangan sampai tujuan yang diinginkan yaitu mendapatkan pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan *e-government* yang menghabiskan dana besar tidak tercapai tetapi justru menjadi tambahan beban keuangan daerah.

Persoalan pendanaan untuk pelaksanaan suatu kegiatan di pemerintah daerah merupakan persoalan uang krusial karena belum semua pemerintah daerah mampu memasukan anggaran *e-government* pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).

Melihat kebutuhan pendanaan bagi pengembangan di Provinsi Sulawesi Tengah tersebut yang direncanakan selama 6 tahun akan sangat berdampak pada percepatan proses penerapan *e-government* secara menyeluruh. Karena dengan alokasi anggaran yang bertahap tersebut akan mengakibatkan pembangunan infrastruktur pengembangan *e-government* dilakukan secara bertahap pula sehingga yang menjadi permasalahan adalah apabila terjadi perubahan kebijakan dalam prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menuntut untuk menunda pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur *e-government* maka akan berkibat pula terhadap pelaksanaan penerapan *e-government* tersebut.

Perencanaan pendanaan untuk penerapan *e-government* di Provinsi Sulawesi Tengah dalam RPJMD 2011-2016 dialokasikan untuk program pengembangan data, informasi dan statistik yang meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu: 1) pengembangan

jaringan dan infrastruktur *e-government*; 2) pengembangan aplikasi dan portal nasional dengan jumlah Rp. 19.650.438.000,- yang

dialokasikan dalam 6 (enam) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Anggaran Pengembangan Jaringan dan Infrastruktur E-Government

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran
1	2011	2.244.750.000
2	2012	3.150.000.000
3	2013	3.307.500.000
4	2014	3.472.875.000
5	2015	3.646.518.000
6	2016	3.828.844.000
Jumlah		19.650.438.000

Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2016

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pengembangan penerapan *e-government* pertahun rata-rata sebesar 3 milyar. Perkiraan total dana yang dibutuhkan untuk pengembangan *e-government* di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Rp. 19.650.438.000,-, sementara APBD Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata pertahun diatas 1 trilyun sehingga dapat dikatakan bahwa pendanaan bagi pengembangan *e-government* dapat dilakukan tanpa harus melalui pendanaan yang bertahap.

Keterampilan

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penerapan *e-government* adalah kemampuan sumberdaya manusia yang melaksanakannya kerana hal ini menyangkut bagaimana mengubah pola pikir pegawai. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menerapkan *e-government* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui pelatihan teknologi informasi.

Di dalam pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia, perlu mengubah pandangan tentang teknologi informasi dan komunikasi; bukan sekadar alat untuk mengelola informasi, melainkan ia memiliki aspek budaya. Teknologi bukan hanya menuntut penguasaan atas perangkat

alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi kerasnya, melainkan mengubah diri kita berinteraksi dengan masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk pelaksanaan alih teknologi kepada operator-operator yang ada di seluruh SKPD Provinsi Sulawesi Tengah, telah dilakukan pelatihan kepada operator di seluruh SKPD serta memberikan peluang kepada operator SKPD untuk magang di BAPPEDA sebagai induk pengelola *e-government* di Provinsi Sulawesi Tengah.

Selama ini, pelatihan *e-government* dalam rangka alih teknologi telah beberapa kali dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai bagi seluruh operator *e-government* di seluruh SKPD.

Metode pelatihan yang dilakukan adalah dengan mendatangkan pelatih (*trainer*) yang berkualitas, dan melalui kelas pelatihan yang telah di set sedemikian rupa, maka peserta pelatihan akan dipandu dan dituntun langkah demi langkah untuk mengerti, memahami, dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan semua teknologi yang akan diterapkan. Selain itu pelatihan yang diberikan kepada operator di SKPD dilakukan dengan praktek langsung (*Hands-On*) untuk

melakukan konfigurasi dan menjalankan teknologi yang ada. Pelatihan yang diberikan adalah seluruh modul aplikasi, infrastruktur, dan software yang digunakan untuk membangun sistem informasi di masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhan database yang akan digunakan pada SKPD.

Pelatihan pada dasarnya untuk membangun kapasitas dan kapabilitas pegawai agar dalam pelaksanaan tugas dapat lebih maksimal. Namun hasil pelatihan yang diberikan dapat tercapai bila didukung pula dengan kemampuan dari sumber daya manusianya dalam menangkap dan memahami apa yang diberikan dalam pelatihan. Dalam penerapan *e-government* di Provinsi Sulawesi Tengah, dilihat dari website SKPD menunjukkan bahwa pada umumnya para operator telah memiliki kemampuan yang memadai untuk menangani *e-government* di SKPDnya masing-masing.

Tehnologi

Tehnologi dalam penerapan *e-government* pada dasarnya berkaitan dengan ketersediaan Perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang memadai. Pada instansi pemerintahan umumnya *hardware* dan *software* yang ada masih dalam kondisi yang standar. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah menerbitkan panduan untuk pembangunan infrastruktur portal pemerintah dan panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah. Adanya panduan yang diterbitkan tersebut diharapkan implementasi *e-government* bisa lebih baik. Khusus untuk pengembangan situs web menuju ke pengembangan *e-government* tingkat kedua dan ketiga, situs web yang ada saat ini perlu ditingkatkan menjadi portal web yang mampu melakukan interaksi dan transaksi elektronik.

Setiap perangkat daerah yang ada harus mempunyai situs web masing-masing dengan menggunakan sub domain/sub direktori dari portal web yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana teknologi dalam kebijakan penerapan *e-government* di Provinsi Sulawesi Tengah sudah memadai dan layak untuk dipergunakan karena teknologi yang digunakan dalam penerapan *e-government* sudah melalui beberapa kajian dan telah memenuhi standar sarana dan prasarana *e-government*.

Berdasarkan rencana induk pengembangan *e-government* Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012, pembangunan infrastruktur jaringan difokuskan pada peningkatan bandwidth, pemantapan system security dan penambahan terminal akses bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada awal pengembangan yaitu tahun 2011, pembangunan infrastruktur jaringan intranet Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah terkoneksi ke 13 titik yang tersiri dari 13 SKPD. Infrastruktur jaringan tersebut menggunakan jaringan wireless dengan kapasitas bandwidth internet sebesar 20 Mbps.

Jaringan tersebut dimanfaatkan untuk akses internet, hosting domain, webserver, wemail serta aplikasi berbasis web yang dikelola oleh bidang IT. Sedangkan pada tahun 2013, diupayakan untuk meningkatkan kapasitas bandwidth menjadi 40 Mbps yang akan disebar ke 45 titik yang ada di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-government* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik namun penerapannya belum berjalan dengan maksimal. Disamping itu, dalam penerapan *e-government*, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum melandasi dengan peraturan baik dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Kepala Daerah

2. Penerapan *e-government* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum seluruhnya dijalankan pada seluruh SKPD, dari 45 SPD yang ada baru 19 SKPD yang dapat melaksanakan *e-government*. Dari segi kapasitas *bandwidth* yang terpasang saat ini baru mencapai 20Mbps yang terbagi ke 19 SKPD dari kapasitas 55 Mbps yang akan dibagi ke 45 SKPD. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah memberikan prioritas pembangunan infrastruktur pengembangan *e-government* dalam RPJMD 2011-2016. Disamping itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) *E-Government* sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembangan *e-government*.

Rekomendasi

1. Hendaknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera mengeluarkan aturan-aturan mengenai penerapan *e-government* agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan dan dalam koridor-koridor yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Website yang ada saat ini hendaknya lebih dioptimalkan kembali terutama yang ada pada SKPD khususnya yang berkaitan dengan informasi-informasi yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat.
3. Hendaknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempertimbangkan kembali pengalokasian pembiayaan pengembangan infrastruktur dan jaringan *e-government* yang dianggarkan secara

bertahap karena hal tersebut akan menimbulkan kendala-kendala baru di tahun yang akan datang.

4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kebijakan penerapan *e-government* karena hal ini menyangkut kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak terutama Ketua Tim Pembimbing. Dr. Muzakir Tawil, M.Si. dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Nawawi Tawil, M.Si., Dr. Slamet Riyadi, M.Si selaku Ketua, Dr. Imam Sofyan, M.Si. selaku Sekretaris, dan Dr. Darwis, M.Si., selaku tim penguji, yang telah banyak meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau di dalam membimbing penulis dengan arif dan bijaksana.

DAFTAR RUJUKAN

- Dwipayana, Ari AAGN. 2003. *Membangun Good Governance Di Desa*. Yogyakarta: Institute For Research And Empowerment (IRE Press).
- Dawes, Sharon S. 2008. *Introduction To Digital Government Research in Public and Management*. New York: Center for Technology in Government, University at Albany/SUNY.
- Habib, Ircham. 2007. *Pengaruh e-Government terhadap Upaya Pelaksanaan Good Governance pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hill, Herman. 2000. "Good Governance", in *Herman Hill and Helmut Klages. Good Governance und Qualitätsmanagement -*

Europäische und internationale
Entwicklungen, Speyer

Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta:
Ghalia Indonesia.